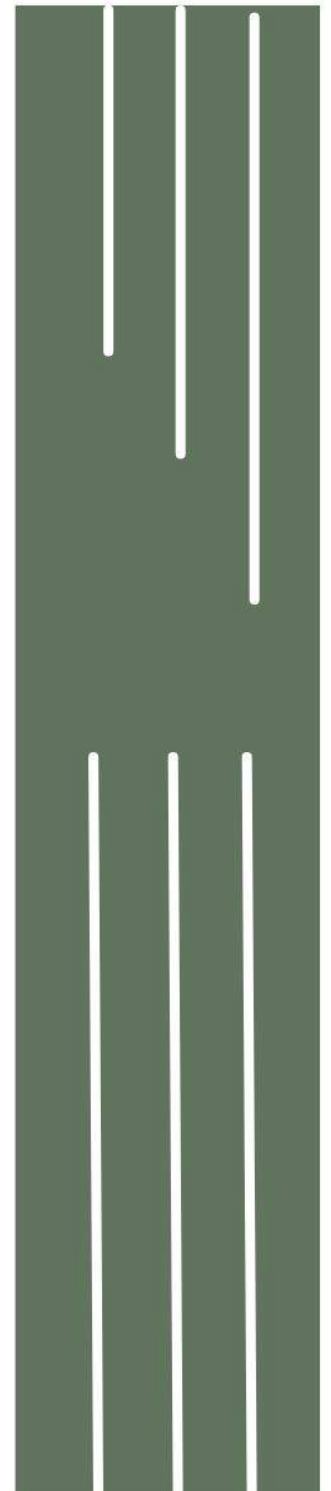




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Sang Mahakuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2021 dengan tepat waktu. Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2021 merupakan laporan yang disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja untuk periode 1 (satu) tahun. Laporan ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor dapat dikategorikan sangat baik. Namun demikian, masih terdapat indikator sasaran yang belum mencapai target yang telah diharapkan. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menilai hasil pelaksanaan kinerja di Dinas Kesehatan serta dapat menjadi dasar bagi para pengambil keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kesehatan dimasa yang akan datang dalam mewujudkan *Clean Government* dan *Good Government* yang lebih produktif, efektif dan efisien.

Demikian laporan ini kami susun, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Bogor, Maret 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BOGOR**



dr. Sri Nowo Retno, MARS
NIP. 19690415 199803 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Umum.....	1
1.1.1 Latar Belakang	1
1.1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.1.3 Sistematika Penyajian	2
1.2 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Bogor.....	3
1.2.1 Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bogor.....	3
1.2.2 Isu-isu Strategis.....	7
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis Dinas Kesehatan	13
2.1.1 Visi dan Misi Kota Bogor.....	13
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	14
2.1.3 Program Kerja	15
2.2 Rencana Kerja.....	15
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	16
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	17
3.2 Capaian dan Evaluasi Kinerja	18
3.2.1 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan	18
3.2.2 Laporan Realisasi Anggaran.....	23
BAB 4 PENUTUP	31
4.1 Kesimpulan.....	31
4.2 Saran.....	32



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2021 merupakan laporan hasil kinerja program / kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Bogor selama Tahun 2021 dengan bersumber dana dari APBD Kota Bogor Tahun 2021 dan sumber dana lainnya.

Sasaran kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor pada Tahun 2021 terdiri dari 3 sasaran dengan 3 indikator. Dari 3 indikator yang diukur sebanyak dua indikator telah mencapai target (50%) dan satu indikator belum mencapai target (50%) dengan kategori sangat baik sebanyak 3 (tiga) indikator.

Hasil evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada beberapa sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kesehatan Kota Bogor ke depan diantaranya perlu penyesuaian tata cara pelaksanaan kegiatan pengawasan, pembinaan, dan pendampingan serta pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru, memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital selama pandemi Covid-19, dan perlu untuk mengoptimalkan kerjasama lintas sektor serta pemberdayaan masyarakat agar ikut serta berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan kesehatan masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2021 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menilai hasil pelaksanaan kinerja di Dinas Kesehatan serta dapat menjadi dasar bagi para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kesehatan di tahun berikutnya.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Umum

1.1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya.

Dinas Kesehatan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan mendukung Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota yang Ramah Keluarga”. Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019- 2024 yaitu :

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat
2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas
3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Oleh sebab itu, disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) selama Tahun Anggaran 2021 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta dapat meningkatkan kinerja pembangunan kesehatan di Kota Bogor.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

1.1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2021 adalah bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan kepada Walikota Kota Bogor.

Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk mewujudkan pertanggungjawaban instansi terhadap pemanfaatan anggaran yang telah dialokasikan di Dinas Kesehatan Tahun anggaran 2021.

1.1.3 Sistematika Penyajian

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Umum

1.1.1 Latar Belakang

1.1.2 Maksud dan Tujuan

1.1.3 Sistematika Penyajian

1.2 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Bogor

1.2.1 Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bogor

1.2.2 Isu-isu Strategis

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Kesehatan

2.2 Rencana Kerja

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

2.5 Rencana Aksi Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

3.2 Capaian dan Evaluasi Kinerja

3.2.1 Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran

3.2.2 Pencapaian Indikator Kinerja Program

3.2.3 Laporan Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

1.2 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Bogor

1.2.1 Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bogor

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah telah menetapkan 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan 8 urusan pemerintahan pilihan. Kesehatan termasuk pada urusan pemerintahan wajib dengan pelayanan dasar.

Kedudukan Dinas Kesehatan merupakan Perangkat Daerah Kota Bogor sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bogor berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Wali Kota.

2. Fungsi

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :


- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi

3. Struktur Organisasi

Struktur Dinas Kesehatan Kota Bogor, terdiri dari :

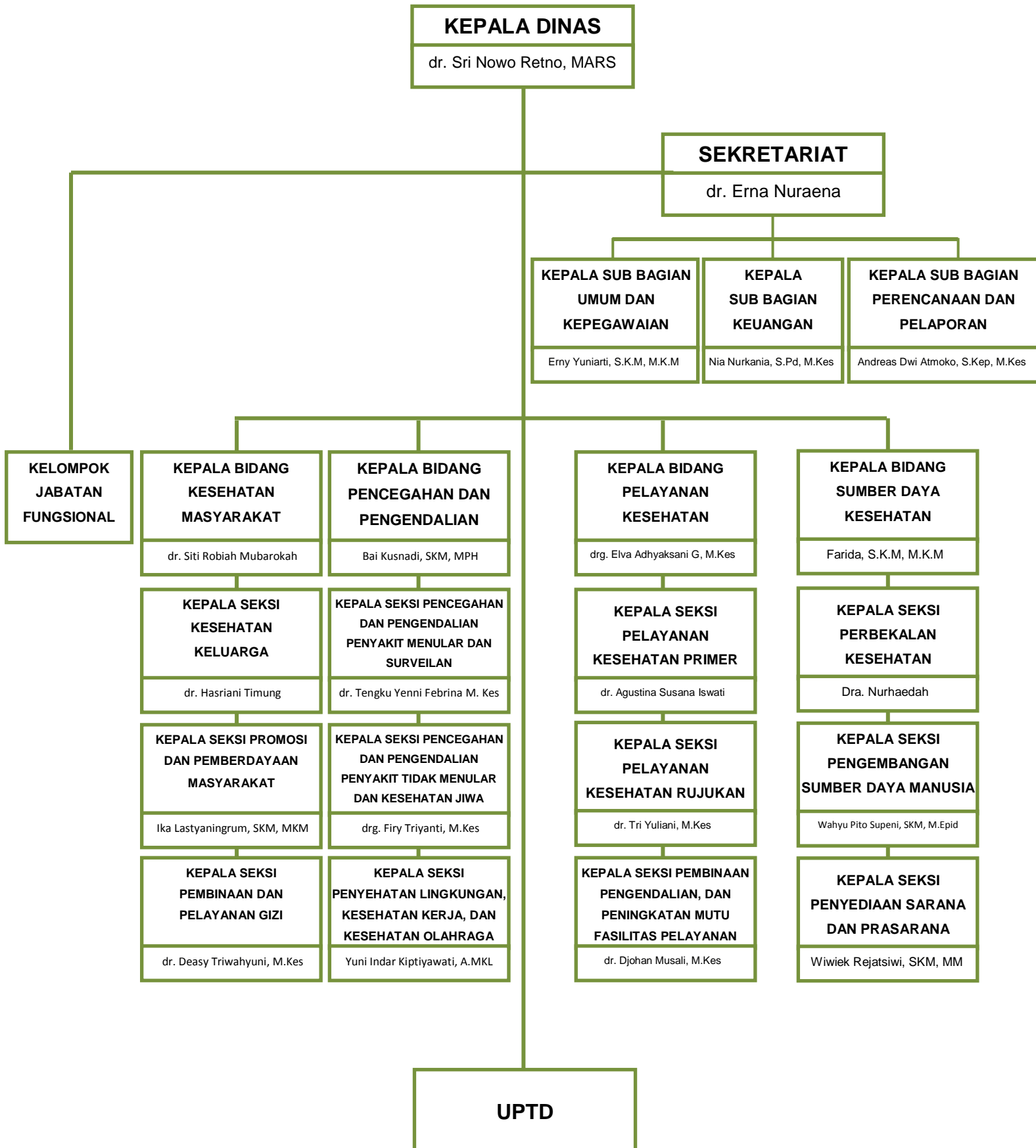
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahkan :
 - Seksi Kesehatan Keluarga;

- Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - Seksi Pembinaan dan Pelayanan Gizi;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahkan :
- Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Surveilans;
 - Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak menular dan Kesehatan Jiwa;
 - Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Kesehatan Olah Raga;
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan :
- Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
 - Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan
 - Seksi Pembinaan, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahkan :
- Seksi Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Obat makanan;
 - Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan;
- g. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat :
- UPTD Puskesmas Bogor Selatan;
 - UPTD Puskesmas Cipaku;
 - UPTD Puskesmas Bondongan;
 - UPTD Puskesmas Lawang Gintung;
 - UPTD Puskesmas Bogor Timur;
 - UPTD Puskesmas Pulo Armin;
 - UPTD Puskesmas Bogor Utara;
 - UPTD Puskesmas Warung Jambu;
 - UPTD Puskesmas Tegal Gundil;
 - UPTD Puskesmas Bogor Tengah;
 - UPTD Puskesmas Merdeka;
 - UPTD Puskesmas Gang Aut;
 - UPTD Puskesmas Belong;
 - UPTD Puskesmas Sempur;
 - UPTD Puskesmas Pasir Mulya;
 - UPTD Puskesmas Semplak;
 - UPTD Puskesmas Pancasan;

- 
- UPTD Puskesmas Sindang Barang;
 - UPTD Puskesmas Gang Kelor;
 - UPTD Puskesmas Tanah Sareal;
 - UPTD Puskesmas Pondok Rumput;
 - UPTD Puskesmas Kedung Badak;
 - UPTD Puskesmas Mekarwangi;
 - UPTD Puskesmas Kayumanis; dan
 - UPTD Puskesmas Mulyaharja;
- h. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bogor berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2021



1.2.2 Isu-isu Strategis

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan:

1. Terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman kesehatan global;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh;
3. Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan *Healthy Adjusted Life Expectancy* (HALE).

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan mempunyai peran sentral sebagai pondasi dalam peningkatan kualitas SDM, khususnya terkait aspek pembangunan sumber daya manusia sebagai modal manusia (*human capital*).

Arah kebijakan RPJMN Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024 yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi, dan pemanfaatan teknologi. Adapun strategis nasional pembangunan kesehatan sesuai RPJMN 2020-2024 adalah :

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi.
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat.
3. Peningkatan pengendalian penyakit.
4. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
5. Penguatan Sistem Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan.

Memperhatikan perkembangan saat ini, maka isu strategis yang masih dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor berdasarkan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat adalah :

1. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar.
2. Penyelenggaraan Pelayanan Gizi.
3. Penyelenggaraan Pelayanan Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan.
4. Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian (Obat).
5. Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan.

Sedangkan isu-isu strategis yang dihadapi baik saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

1. Implementasi Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan
2. Mewujudkan Generasi yang Sehat Menghadapi Bonus Demografi
3. SUN-Scaling Up Nutrition (Gerakan 1000 HPK)
4. Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
5. Adanya Beban Ganda Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular (Tripple Barden) terutama TB, HIV/AIDS, DM, Hipertensi, Gangguan Jiwa
6. Komitmen Global berupa *Sustainable Development Goals* (SDGs) terutama Target nasional berupa Komitmen eliminasi penyakit menular khususnya Indonesia eliminasi TB Paru Tahun 2030
7. Peningkatan Akses Sanitasi Layak
8. Penyelenggaraan akses layanan melalui Kunjungan dokter keluarga
9. Penyelenggaraan layanan kesehatan Konseling dan Call Center 24 Jam pada fasilitas kesehatan
10. Pembangunan Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (PIS PK).
11. Standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan Swasta
12. Peningkatan Mutu Pelayanan pada fasilitas kesehatan melalui akreditasi
13. Kebijakan pemerintah Kab/kota untuk Jaminan Kesehatan Nasional (*Universal Health Coverage*)
14. Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar
15. *Smart Health System* (Pendekatan Pelayanan Dengan Sistem Teknologi Informasi) yang terintegrasi
16. Mendorong peningkatan pengelolaan PPK BLUD Puskesmas
17. Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas
18. Pencegahan dan penanggulangan Covid-19

Untuk mendukung upaya pencapaian sasaran dan tujuan menuju perwujudan visi dan misi Dinas kesehatan dan mendukung visi Kota Bogor, terdapat beberapa aspek strategi yang mempengaruhi, yaitu :

A. Aspek Sumber Daya Kesehatan

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sumber daya manusia adalah tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan. Sumber daya manusia tersebut bertanggung jawab dalam melakukan kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik dari aspek administrasi, manajemen dan teknis untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2021

Rumpun SDM	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
Medis	597	983	1580
Keperawatan	919	2238	3157
Kefarmasian	96	364	460
Kesehatan Lingkungan	12	38	50
Keterapian Fisik	52	85	137
Teknik Biomedika	145	273	418
Psikologi Klinis	1	15	16
Kebidanan	0	696	696
Kesehatan Masyarakat	22	95	117
Gizi	7	98	105
Keteknisian Medis	61	127	188
Nakes lainnya	50	133	183
Asisten Tenaga Kesehatan ; Keperawatan	26	128	154
Asisten Tenaga Kesehatan ; Kefarmasian	91	394	485
Asisten Tenaga Kesehatan ; Kesehatan Lingkungan	5	11	16
Asisten Tenaga Kesehatan ; Keteknisian Medis	1	6	7
Asisten Tenaga Kesehatan ; Kebidanan	1	22	23
Asisten Tenaga Kesehatan ; Teknik Biomedika	16	47	63

Rumpun SDM	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
Asisten Tenaga Kesehatan ; Gizi	58	58	116
Tenaga Penunjang ; Dukungan Manajemen	2247	1767	4014
Tenaga Penunjang ; Struktural	125	142	267
Tenaga Penunjang ; Pendidikan dan Pelatihan	1	2	3
Total			12255

Sumber : Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas jumlah SDM Kesehatan yang ada di Kota Bogor sebanyak 12.255 orang yang tersebar di berbagai unit fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun rumpun tenaga keperawatan yang paling banyak ditempati dengan jumlah 3157 orang atau 25,76% dari total keseluruhan. Kemudian rumpun medis dengan jumlah 1580 orang atau 12,89% dari total keseluruhan. Dilanjutkan dengan rumpun kebidanan dengan jumlah 696 orang atau 5,68% dari total keseluruhan sedangkan rumpun asisten tenaga kesehatan dengan jumlah 386 orang atau 3,15% dari total keseluruhan, dan unsur manajerial sebanyak 4284 orang atau 34,96% dari keseluruhan.

Tabel 1.2 Jenis dan jumlah Sarana Kesehatan di Kota Bogor Tahun 2021

Jenis Sarana Kesehatan	Kecamatan						Jumlah
	Bogor Selatan	Bogor Timur	Bogor Utara	Bogor Tengah	Bogor Barat	Tanah Sareal	
Rumah Sakit Umum General Hospital	3	3	2	4	4	1	17
Rumah Sakit Khusus Special Hospital	0	0	1	1	1	2	5
Puskesmas Rawat Inap Public Health Center with Inpatient Care	1	1	1	1	1	2	7
Puskesmas Non Rawat Inap Public Health Center without Inpatient Care	4	1	2	4	4	3	18
Puskesmas Pembantu	6	4	8	5	3	5	31
Klinik Pratama Primary Clinic	11	19	26	25	23	20	124
Posyandu Integrated Health Post	224	98	149	128	211	170	980
UPTD Labkesda	-	-	-	-	-	1	1

Sumber : Seksi Pembinaan, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2021

Berdasarkan pada tabel diatas, jumlah sarana kesehatan di Kota Bogor sudah merata di seluruh kecamatan terutama untuk pelayanan dasar. Namun demikian perlu dilakukan pemetaan distribusi sarana kesehatan ditiap kelurahan baik di ditingkat pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, sebagai dasar pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam upaya memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

B. ASPEK PEMBIAYAAN KESEHATAN

Pembiayaan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2021 bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi, dan APBN. Rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3 Alokasi Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2021

NO	SUMBER BIAYA	ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN	%
1	APBD KAB/KOTA	Rp. 196,557,109,220	50.84%
	a. Belanja Langsung	Rp. 81,126,424,612	
	b. Belanja Tidak Langsung	Rp. 67,667,636,104	
	c. Dana Insentif Daerah	Rp. 47,763,048,504	
2	APBD PROVINSI	Rp. 92,682,605,500	23.97%
	a. Belanja Langsung	Rp. 92,682,605,500	
	b. Belanja Tidak Langsung	Rp. 0	
3	APBN :	Rp. 27,114,935,095	7.01%
	a. Dana Alokasi Khusus (DAK)		
	- DAK fisik		
	1. Reguler	Rp. 6,360,037,095	
	2. Penugasan	Rp. 464,202,000	
	- DAK non fisik		
	1. BOK	Rp. 15,608,503,000	
	2. Akreditasi	Rp. 1,282,193,000	
	b. DBHCHT	Rp. 3,400,000,000	
4	SUMBER PEMERINTAH LAIN*	Rp. 70,252,704,964	18.17%
	a. Kapitasi JKN (BLUD)	Rp. 63,856,906,451	
	b. BTT (Bantuan Tak Terduga)	6,395,798,513	
	TOTAL ANGGARAN KESEHATAN	Rp. 386,607,354,779	
	TOTAL APBD KAB/KOTA	Rp. 2,847,106,102,621	
	% APBD KESEHATAN THD APBD KAB/KOTA		13.58%
	% BELANJA LANGSUNG THD APBD KOTA		6.10%
	ANGGARAN KESEHATAN PERKAPITA	Rp. 343,063	

C. ASPEK WILAYAH

Wilayah administrasi Kota Bogor mempunyai luas wilayah 11.850 Ha, terdiri dari 6 Kecamatan, 68 Kelurahan, 795 RW. Jumlah penduduk Kota Bogor pada Tahun 2021 sebanyak 1.126.927 orang dengan jumlah terpadat di Kecamatan Bogor Barat dan terluas di Kecamatan Bogor Barat. Dengan memperhatikan luas wilayah dan jumlah penduduk akses kemudahan dalam mencapai sarana kesehatan sangat terjangkau. Pada Tahun 2021 dari 68 Kelurahan terdapat 56 kelurahan yang sudah tersedia puskesmas/puskesmas pembantu dan dapat ditempuh oleh kendaraan roda dua ataupun roda empat sehingga masyarakat dapat mengakses ke sarana kesehatan tersebut untuk mendapat pelayanan kesehatan.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Kesehatan

2.1.1 Visi dan Misi Kota Bogor

Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang tertuang dalam RPJMD adalah “Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga” dengan ruang lingkup meliputi seluruh warga yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor. Adapun “Kota Yang Ramah Keluarga” dapat diartikan sebagai berikut :

1. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, pendidikan, sosial masyarakatnya serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik.
2. Kondisi Ramah Keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sektor ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
3. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan bermasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten.

Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 3 (tiga) Misi, yaitu :

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat
2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas
3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Misi yang berkaitan dengan Dinas Kesehatan dalam mendukung Visi termasuk pada Misi ke 1 dan 2 yaitu “Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat dan Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas”. Kota Bogor Yang Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.

Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota. Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (*sensing*), memahami kondisi permasalahannya

(*understanding*), dan mengatur/mengambil tindakan (*acting*) terhadap berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota yang Ramah Keluarga” dengan didukung oleh 3 (Tiga) Misi. Adapun tujuan, sasaran, dan program Dinas Kesehatan Kota Bogor yang mendukung pada visi dan misi ke 1 dan 2 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor 2019-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, dan Program Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2019-2024

No	Misi	Tujuan	Sasaran Pembangunan	Judul Program
1	Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat	Terwujudnya Masyarakat Kota Bogor yang Sehat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
2	Mewujudkan Kota yang Cerdas	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Cerdas dan Melayani	Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesehatan memiliki 3 sasaran pembangunan yang didukung oleh 4 program pembangunan bidang kesehatan dan 1 program penunjang urusan pemerintahan daerah.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Masyarakat Kota Bogor yang Sehat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	73.87 Tahun
2		Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	% Rumah Tangga Ber-PHBS	69 %
3	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Cerdas dan Melayani	Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Indeks Birokrasi Reformasi	BB

2.1.3 Program Kerja

Program pembangunan kesehatan dirumuskan berdasarkan pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada RPJMD Kota Bogor selain itu juga mengaju kepada program pemerintah pusat seperti Germas, PIS-PK, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, program provinsi dan konvensi internasional diantaranya *Sustainable Development Goals* (SDGs). Adapun program/kegiatan yang mendukung pada visi, misi, tujuan dan sasaran pada Urusan Kesehatan, untuk periode 2019-2024 yaitu :

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
 - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
2. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 - a. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
3. Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2.2 Rencana Kerja

Rencana Kerja Tahunan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun dan merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari RPJMD dan Renstra untuk tahun yang bersangkutan. Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Tahunan adalah untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, maupun pengawasan.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Bogor tahun 2021 dapat dilihat dalam lampiran, yang terdiri dari rencana kerja tahun 2021 dan refofusing anggaran akibat Covid-19 dan anggaran perubahan lampiran II.

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Melalui penetapan IKU diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun IKU Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Sasaran 1 :
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir
2. Sasaran 2 :
Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan Indikator Reformasi Birokrasi.

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dinas Kesehatan Kota Bogor telah ditetapkan perjanjian kinerja berdasarkan anggaran murni dan anggaran perubahan pada Tahun 2021 dengan 2 sasaran dan 2 indikator sasaran (lampiran).

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu. Suatu lembaga dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari presentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, dan pengukuran kinerja dituangkan dalam formulir pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja di Dinas Kesehatan Kota Bogor, yakni dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Skala Capaian (%)	Kategori
85 - 100	Sangat Baik
70 - <85	Baik
55 - <70	Cukup
<55	Kurang
Realisasi	Keterangan
> Target	Tercapai dan Melebihi Target
= Target	Tercapai
< Target	Tidak Mencapai Target

3.2 Capaian dan Evaluasi Kinerja

3.2.1 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan

A. Sasaran 1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat merupakan sasaran yang mendukung visi dan misi ke-1 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor 2019-2024. Sasaran ini memiliki satu indikator yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir.

Tabel 3.1 Capaian Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2021

Indikator Kinerja	2020			2021			Kategori
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	73.96	73.61	99.53	73.87	73.82	99.93	Sangat Baik

Realisasi kinerja angka harapan hidup (AHH) saat lahir Tahun 2020 yaitu 73.61, dengan pencapaian sebesar 99.53%. Sedangkan realisasi kinerja angka harapan hidup (AHH) saat lahir Tahun 2021 yaitu 73.82, dengan pencapaian sebesar 99.93%. Walaupun belum mencapai target yang telah ditetapkan, terjadi peningkatan kinerja sebesar 0.21 dari tahun 2020 ke tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan pencapaian Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (73.23), capaian AHH saat lahir lebih tinggi 0.59 poin.

Realisasi kinerja angka harapan hidup (AHH) saat lahir Tahun 2021 sebesar 73.82 memiliki makna bahwa seorang bayi yang dilahirkan di Kota Bogor pada Tahun 2021 mempunyai harapan untuk hidup selama 73.82 tahun ke depan atau rata-rata tahun hidup yang akan dijalani seseorang akan mencapai umur 73.82 tahun ke depan.

Terdapat 3 (tiga) program yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yaitu seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.2 Capaian Program yang Mendukung Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2021

Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	0.30	0.26	87%	Sangat Baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	84%	89.7%	100%	Sangat Baik
	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi	90%	0%	0%	Kurang
	Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan yang Sesuai dengan Kualifikasi dan Kompetensi yang Dibutuhkan	84%	97.4%	100%	Sangat Baik

Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Produsen Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan	100%	64%	64%	Cukup

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yaitu indeks keluarga sehat sebesar 0.26 point dengan pencapaian sebesar 87%. Hal itu dikarenakan pada tahun 2021 Kota Bogor masih dihadapkan pandemi Covid-19 yang menyebabkan terbatasnya pelaksanaan kunjungan rumah dan intervensi lanjut. Selain itu, puskesmas hanya memanfaatkan pencatatan kegiatan melalui aplikasi PIS-PK yang mana aplikasi PIS-PK dari segi updating data IKS per Puskesmas belum dikelola dengan baik yang menyebabkan sulitnya memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulannya. Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan pembinaan teknis kepada setiap pemegang PIS-PK di masing-masing puskesmas, melakukan monitoring dan evaluasi, dan melakukan permohonan update aplikasi setiap bulan ke Pusdatin.

Satu indikator kinerja program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan yaitu persentase tenaga kesehatan lulus uji kompetensi tidak mencapai target. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya pengajuan tenaga kesehatan yang hendak melakukan uji kompetensi dan tidak tercatatnya tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi di Tahun 2021.

Selain itu, realisasi indikator kinerja program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yaitu persentase produsen farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar kesehatan sebesar 64%. Hal itu disebabkan banyaknya sarana yang tidak memenuhi syarat sertifikasi. Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan pembinaan kepada sarana yang belum memenuhi syarat sertifikasi.

Secara umum, upaya yang telah dilakukan guna mendukung pencapaian AHH saat lahir dan dalam rangka pencegahan Covid-19 antara lain dengan melakukan kolaborasi dan inovasi dengan unsur kementerian kesehatan, kepolisian, TNI Polri, dan berbagai organisasi kemasyarakatan melalui deteksi dini Covid-19, pemberian vaksinasi, dll.



Deteksi Dini Covid-19



Kegiatan Vaksinasi Covid-19



Moyan Sehat

B. Sasaran 2 : Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Tabel 3.3 Capaian Sasaran Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Indikator Kinerja	2020			2021			Kategori
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
% Rumah Tangga ber-PHBS	68	66.3	98	69	69.3	100	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja indikator persentase rumah tangga ber-PHBS Tahun 2021 sebesar 69.3%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2020 terdapat kenaikan realisasi kinerja sebesar 3.0%. Rumah tangga ber-PHBS ditentukan dari capaian 10 (sepuluh) indikator PHBS rumah tangga. Apabila dari 10 (sepuluh) indikator tersebut terdapat 1 atau 2 indikator yang tidak tercapai maka dikategorikan sebagai rumah tangga yang tidak ber PHBS. Apabila di satu rumah tangga terdiri lebih dari satu KK (kepala keluarga), maka diambil KK yang memenuhi 10 indikator PHBS RT.

Data PHBS rumah tangga (RT) diperoleh dari hasil survei pendataan PHBS RT yang dilakukan oleh kader dan petugas promosi kesehatan (promkes) puskesmas di masing-masing RW. Pendataan dilakukan oleh kader yang telah dilatih tentang PHBS RT. Hasil survei tersebut kemudian dilanjutkan dengan penginputan sekaligus pengolahan data oleh petugas promkes puskesmas. Pada tahun 2021 pendataan dilakukan terhadap 210.482 RT dengan jumlah RT yang ber-PHBS sebesar 145.792 (69.3%). Adapun capaian persentase PHBS RT per Kecamatan serta Persentase Capaian 10 Indikator PHBS RT tahun 2020 s.d 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.4 Capaian Persentase Rumah Tangga ber-PHBS per Kecamatan

No	Kecamatan	2020 (%)	2021 (%)
1	Tanah Sareal	70,8	71,4
2	Bogor Tengah	67,7	67,3
3	Bogor Timur	62,9	63,6
4	Bogor Utara	70,8	69,4
5	Bogor Selatan	57,0	67,4
6	Bogor Barat	65,3	72,1
Kota Bogor		66,3	69,3
Target		68	69

Salah satu faktor pendukung tercapainya target persentase Rumah Tangga ber-PHBS Tahun 2021 disebabkan oleh kegiatan kampanye protokol kesehatan 5M yang digalakkan selama pandemi Covid-19. Salah satu arahan dari kegiatan protokol kesehatan yaitu mencuci tangan pakai sabun yang merupakan salah satu indikator rumah tangga ber-PHBS. Selama pandemi Covid-19 juga, masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker sehingga dapat mengurangi kebiasaan merokok.

Selain 2 (dua) indikator tersebut, sebagian besar masyarakat menerapkan indikator PHBS rumah tangga lainnya seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, makan buah dan sayur setiap hari guna meningkatkan imunitas tubuh serta untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase rumah tangga ber-PHBS diantaranya :

1. Kampanye Masif Perubahan Perilaku Masyarakat di Berbagai Tatanan dengan melibatkan OPD, lintas program Dinkes, media, serta dunia usaha / swasta untuk meningkatkan peran aktif dan jejaring kemitraan "Pentahelix".
2. Kampanye PHBS, Germas, Covid-19, dan Program Kesehatan Lainnya kepada masyarakat luas Kota Bogor dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.
3. Program inovasi "Ngariung Sehat" dalam rangka mengintervensi masalah PHBS RT serta meningkatkan cakupan PHBS di masyarakat. Kegiatan ngariung sehat dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan di wilayah serta untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut sehingga cakupan PHBS RT menjadi meningkat.
4. Integrasi dengan data PIS-PK untuk melakukan intervensi sesuai dengan permasalahan PHBS rumah tangga
5. Deklarasi komitmen dan pembentukan Komunitas Warga Tanpa Rokok (KWTR)
6. Peningkatan peran serta dan peran aktif organisasi kepemudaan seperti Duta Muda Sehat dan Saka Bakti Husada dalam program Kesehatan
7. Peningkatan jejaring kemitraan dengan Tim Penggerak PKK untuk meningkatkan peran kader Dasawisma dalam pembinaan dan peningkatan PHBS di setiap rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya
8. Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media promosi kesehatan (media cetak, media elektronik, media sosial)



Kegiatan Ngariung Sehat



Pembentukan Komunitas Warga Tanpa Rokok



Kampanye Masif

C. Sasaran 3 : Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel

Tabel 3.5 Capaian Sasaran Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel Tahun 2021

Indikator Kinerja	2020			2021			Kategori
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Indeks Reformasi Birokrasi	BB	A	100	BB	A	100	Sangat Baik

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan.

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Adapun penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi dilihat berdasarkan delapan area perubahan yang tertera dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi, meliputi :

- Manajemen Perubahan
- Deregulasi Kebijakan
- Penataan Organisasi
- Penataan Tatalaksana
- Penataan SDM Aparatur
- Penguatan Akuntabilitas
- Penguatan Pengawasan
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Terdapat satu program guna mendukung pencapaian indikator sasaran terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.6 Capaian Program yang Mendukung Terciptanya Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel Tahun 2021

Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	82.2 Nilai	78.49	95.5%	Sangat Baik

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2021 dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bogor pada tahun 2021 memperoleh nilai 78,49. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 capaian indikator nilai hasil evaluasi LKIP Dinas Kesehatan sebesar 95.5%. Hal itu disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur sesuai Kemeterian Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 dan Permendagri 90 Tahun 2019 yang menyebabkan isi dokumen perencanaan tidak selaras satu dengan yang lainnya serta adanya perubahan RPJMD dan Renstra di Tahun 2020-2021. Upaya yang telah dilakukan yaitu mereview kembali rancangan RPJMD serta Renstra perubahan.

3.2.2 Laporan Realisasi Anggaran

Dinas Kesehatan Kota Bogor telah menetapkan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024 dan Renstra Perubahan Tahun 2019-2024. Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2021 yaitu Rp. 289,239,714,720 dipergunakan untuk mencapai indikator-indikator sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan sesuai dengan masing-masing misi untuk mendukung RPJMD Kota Bogor.

Terdapat Silpa dalam penyerapan anggaran pada belanja tidak langsung yaitu mutasi pegawai, pensiun pegawai, belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tunjangan fungsional, anggaran peruntukan pegawai baru apabila ada rekrutmen CPNS, dan lain-lain. Sedangkan silpa dalam penyerapan belanja langsung disebabkan karena selama Pandemi Covid-19 tidak semua kegiatan bisa dilaksanakan dan terdapat beberapa kegiatan yang memanfaatkan teknologi digital seperti zoom meeting sehingga tidak ada penggandaan fotocopy untuk peserta. Penyebab lain anggaran yang belum terserap adalah hasil harga negosiasi dengan pihak ke tiga, sisa anggaran belanja pengadaan dan pemeliharaan, sisa belanja barang habis pakai, honor narasumber, honor peserta, honor PNS dan Non PNS, dan lain-lain. Realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2021

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		85,863,332,223	81,816,223,459	95
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92,832,000	92,832,000	100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51,982,000	51,982,000	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40,850,000	40,850,000	100
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	68,653,671,704	67.424.820.295	98,21
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	67,667,636,104	66.478.660.315	98,24
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	986,035,600	946.159.980	95,96
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13,894,221,630	11.222.494.983	80,77
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	83,998,400	81.434.650	96,95
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,104,258,430	956.906.857	86,66
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	378,628,500	211.884.213	55,96
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10,749,387,800	9.348.217.800	86,97
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,577,948,500	624.051.463	39,55
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	877,567,323	873.142.459	99,50
1	Pengadaan Mebel	74,166,100	73.112.000	98,58
2	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	803,401,223	800.030.459	99,58
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,583,164,066	1.458.690.165	92,14
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	640,000,000	543.607.549	84,94
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	943,164,066	915.082.616	97,02
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	761,875,500	744.243.557	97,69
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	354,775,500	350.525.042	98,80

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
2	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	107,100,000	101.585.000	94,85
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300,000,000	292.133.515	97,38
G	Peningkatan Pelayanan BLUD			
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	63,856,906,451	45,946.109.348	71.95
2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bogor Selatan	3,831,021,773	2,098,412,541	54.77
3	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Cipaku	2,906,477,490	2,513,711,419	86.49
4	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bondongan	3,901,061,052	1,887,704,104	48.39
5	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lawang Gintung	2,138,771,328	1,235,597,308	57.77
6	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bogor Timur	3,947,692,464	2,956,664,193	74.90
7	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pulo Armin	2,090,367,395	1,731,797,460	82.85
8	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bogor Tengah	1,785,721,647	1,406,403,344	78.76
9	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sempur	1,675,247,831	1,116,730,386	66.66
10	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gang Aut	1,109,176,249	764,324,902	68.91
11	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Belong	663,486,738	492,685,527	74.26
12	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Merdeka	1,937,593,971	1,460,487,076	75.38
13	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Semplak	2,852,726,660	2,014,176,078	70.61
14	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pancasan	1,960,930,694	1,651,279,001	84.21
15	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pasir Mulya	2,787,026,282	2,077,678,178	74.55
16	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gang Kelor	2,906,159,593	1,825,854,413	62.83
17	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sindang Barang	4,201,906,946	2,809,441,429	66.86
18	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bogor Utara	3,641,670,186	3,123,394,050	85.77

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
19	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tegal Gundil	2,263,906,619	1,568,714,161	69.29
20	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Warung Jambu	3,036,330,287	2,153,957,309	70.94
21	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tanah Sareal	2,479,383,463	2,024,639,879	81.66
22	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pondok Rumput	873,693,321	688,035,174	78.75
23	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kedung Badak	2,571,255,885	1,988,318,690	77.33
24	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kayumanis	2,935,935,562	2,055,216,756	70.00
25	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mekarwangi	2,492,401,768	2,188,045,709	87.79
26	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mulyaharja	2,073,942,247	1,324,309,355	63.85
27	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Labkesda	793,019,000	788,530,906	99.43
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		166,679,130,421	130,262,160,443	78
A	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	46,307,059,521	23.760.091.841	51,31
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	689,735,817	682.910.139	99,01
2	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4,495,506,935	3.073.149.518	68,36
3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (BU DAK)	2,336,432,820	1.674.490.661	71,67
4	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	99,100,000	98.827.978	99,73
5	Pengadaan Obat, Vaksin	5,790,425,249	2.269.240.378	39,19
6	Pengadaan Bahan Habis Pakai	32,895,858,700	15.961.473.167	48,52
B	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120,023,433,900	106.174.669.502	88,46
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	199,887,800	161.254.050	80,67
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	142,921,400	113.221.400	79,22
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	124,937,800	41.025.000	32,84

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	59,625,400	29.838.600	50,04
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	153,926,400	138.198.420	89,78
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	193,847,200	165.294.906	85,27
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	101,733,200	101.042.500	99,32
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	40,912,200	38.227.200	93,44
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	19,567,200	12.642.000	64,61
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	30,143,400	28.706.000	95,23
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	31,064,000	27.464.000	88,41
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	182,893,000	126.106.500	68,95
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100,000,000	100.000.000	100
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1,470,267,000	807.067.000	54,89
15	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Kerja	7,690,000	7.690.000	100
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2,066,709,800	1.036.946.545	50,17
17	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	77,852,400	76.624.150	98,42
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1,008,000	1,008,000	100
19	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	503,298,400	348.580.546	69,26
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6,320,000	6.317.890	99,97
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1,330,000	1.330.000	100
22	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	22,752,000	22.752.000	100
23	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	152,688,400	129.930.000	85,09
24	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	92,682,605,500	89.765.415.041	96,85
25	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	97,648,000	97.648.000	100

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
26	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1,305,833,000	592.849.000	45,40
27	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	20,119,051,400	12.082.560.126	60,06
28	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	126,921,000	114.930.628	90,55
C	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	295,952,000	292.306.000	98,77
1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	8,636,000	8.636.000	100
2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	179,316,000	175.670.000	97,97
3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	108,000,000	108.000.000	100
D	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52,685,000	35.093.100	66,61
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	6,299,200	6.299.200	100
2	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	46,385,800	28.793.900	62,07
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		21,158,388,076	19,419,616,615	91,78
A	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	512,000	512,000	100
1	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	512,000	512,000	100
B	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	20,760,852,676	19.038.681.215	91,70
1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6,596,000	6,596,000	100
2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	20,739,260,276	19.017.088.815	91,70
3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	14,996,400	14.996.400	100
C	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	397,023,400	380.423.400	95,82

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
4	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	397,023,400	380.423.400	95,82
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		606,888,000	501,206,500	83
A	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	25,378,000	8.053.000	31,73
1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	21,738,000	7.113.000	32,72
2	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	3,640,000	940.000	25,82
B	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	548,228,000	469.683.500	85,67
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	548,228,000	469.683.500	85,67
C	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	24,112,000	14.320.000	59,39
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	24,112,000	14.320.000	59,39
D	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	0	0	-
1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	0	0	-

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
E	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	9,170,000	9.150.000	99,78
1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	8,500,000	8.500.000	100
2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	670,000	650.000	97,01
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		14,931,976,000	14,718,841,550	98,57
A	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	203,096,000	182.561.550	89,89
1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	203,096,000	182.561.550	89,89
B	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	97,280,000	97.280.000	100
1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	97,280,000	97.280.000	100
C	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14,631,600,000	14.439.000.000	98,68
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14,631,600,000	14.439.000.000	98,68
Total		289,239,714,720	246.718.048.567	85,30

BAB 4 PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja sekaligus sebagai informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari 3 (tiga) indikator sasaran Dinas Kesehatan Kota Bogor, terdapat Dua indikator yang mencapai target dan satu indikator yang tidak mencapai target dengan kategori sangat baik sebanyak 3 (tiga) indikator.
2. Adanya peningkatan realisasi kinerja angka harapan hidup (AHH) saat lahir sebesar 0.21 dari Tahun 2020 ke Tahun 2021.
3. Adanya peningkatan realisasi kinerja persentase rumah tangga ber-PHBS sebesar 3.0% dari Tahun 2020 ke Tahun 2021.
4. Realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2021 sebesar 85.30%, dengan silpa disebabkan oleh mutasi pegawai, pensiun pegawai, belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tunjangan fungsional, anggaran peruntukan pegawai baru apabila ada rekrutmen CPNS, silpa hasil harga negosiasi dengan pihak ke tiga, sisa anggaran belanja pengadaan dan pemeliharaan, sisa belanja barang habis pakai, honor narasumber, honor peserta, honor PNS dan Non PNS, dan lain-lain.
5. Adapun hambatan yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2021 dalam mencapai target sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yaitu :
 - Hambatan dalam pencapaian indikator indeks keluarga sehat yaitu pemegang program hanya memanfaatkan aplikasi PIS-PK dalam melakukan updating data dan tidak menggunakan pencatatan secara manual, sehingga sulitnya memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui aplikasi PIS-PK dikarenakan aplikasi PIS-PK dari segi updating data IKS per Puskesmas belum dikelola dengan baik oleh Kementerian Kesehatan.
 - Hambatan dalam pencapaian target indikator persentase tenaga kesehatan lulus uji kompetensi yaitu tidak adanya pengajuan tenaga kesehatan yang hendak melakukan uji kompetensi dan tidak tercatatnya tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi di Tahun 2021.

- Hambatan dalam pencapaian target indikator persentase produsen farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar kesehatan yaitu banyaknya sarana yang tidak memenuhi syarat sertifikasi dan terbatasnya SDM dalam melakukan pembinaan dikarenakan SDM difokuskan dalam percepatan vaksinasi massal.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian di atas maka berikut ini disampaikan beberapa saran untuk meningkatkan pencapaian indikator sasaran melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Masalah kesehatan bukanlah menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Bogor saja. Oleh sebab itu, perlunya peningkatan kemitraan dan peran serta dari lintas sektor, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan swasta dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Bogor.
2. Perlu adanya upaya sosialisasi yang lebih gencar lagi dan didukung dengan media promosi yang dapat diakses oleh semua produsen farmasi, alat kesehatan, dan makanan guna memenuhi persyaratan standar kesehatan .
3. Perlu adanya peningkatan kapasitas SDM guna memanfaatkan teknologi digital sehingga kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara offline dikarenakan pandemi Covid-19 bisa tetap berjalan dengan baik secara online.